



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf (b) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
4. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 Nomor 48);
10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020 Nomor 120).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

- masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APBKp, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung;
 4. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Kampung yang akan diterima oleh setiap Kampung secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Anggaran Dana Kampung yang dibagi dengan jumlah Kampung dalam Kabupaten;
 5. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status kampung tertinggal dan kampung sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
 6. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada kampung yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
 7. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung setiap kabupaten;
 8. Pemerintah Kampung adalah Pengulu yang dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
 9. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 2

Rincian Dana Kampung setiap Kampung Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, diberikan kepada kampung dengan kinerja baik sebanyak 10% (sepuluh perseratus) dari total jumlah kampung.
- (2) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilaian Kinerja berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja antara lain :
 - a. Pengelolaan Keuangan Kampung;
 - b. Pengelolaan Dana Kampung;
 - c. Capaian Keluaran (*output*) Dana Kampung; dan
 - d. Capaian Hasil (*outcome*) Pembangunan Kampung.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan keuangan kampung sebagaimana pada pasal 5 ayat (2) huruf a dinilai dari perubahan rasio PAK terhadap total pendapatan APBKp dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBKp.
- (2) Pengelolaan dana kampung sebagaimana pada pasal 5 ayat (2) huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana kampung terhadap total dana kampung dan persentase pengadaan barang jasa dana kampung secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Kampung sebagaimana pada pasal 5 ayat (2) huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana kampung dan persentase capaian output dana kampung.

- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan kampung sebagaimana pada pasal 5 ayat (2) huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status kampung, status kampung terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 7

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Penghitungan alokasi formula setiap kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} \\ * AF \text{ Kabupaten.}$$

Keterangan:

AF Kampung = Alokasi Formula setiap kampung.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kampung Kabupaten Gayo Lues.

Kabupaten Gayo Lues.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung Kabupaten Gayo Lues.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah kampung Kabupaten Gayo Lues.

Z4 = Rasio IKG setiap kampung terhadap IKG kampung Kabupaten Gayo Lues.

AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 10

- (1) Dana Kampung disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kampung setiap Daerah

Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK.

- (3) Pemotongan Dana Kampung setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Kampung Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Kampung hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung;
 2. Peraturan Kampung mengenai APBKp; dan
 3. Surat Kuasa Pemindah Bukuan Dana Kampung.

b. Tahap II berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

c. Tahap III berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:

a. Tahap I berupa:

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung;
2. Peraturan Kampung mengenai APBKp; dan
3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Kampung; dan

b. Tahap II berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.

(3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Kampung, dan wajib

disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pengulu Kampung menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa Resam Kampung mengenai APBKp;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian Keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata - rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan

2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pengulu Kampung menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa Resam Kampung mengenai APBKp; dan
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Kampung yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Pengulu Kampung menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV
PENGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 13

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Kampung diatur dan diurus oleh kampung berdasarkan kewenangan kampung.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian (SDGs) *Sustainable Development Goals* kampung melalui :
 - (a) Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kampung;
 - (b) Program prioritas nasional sesuai kewenangan kampung; dan
 - (c) Adaptasi Kebiasaan Baru Kampung.
- (3) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Resam Kampung mengenai APBKp.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat kampung setempat.

Pasal 15

- (1) Pengulu Kampung bertanggungjawab atas penggunaan Dana Kampung.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB V
SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);

- b. Terdapat Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Kampung tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh APIP dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kampung.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. Terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari APIP.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Pengulu Kampung yang bersangkutan mengenai Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBKp tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBK Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua Bulan Juni Tahun Anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga Bulan Juni Tahun Anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Kampung di RKK lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

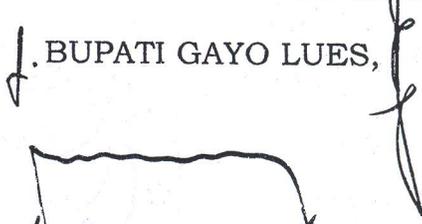
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

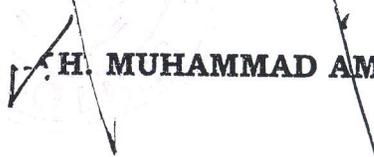
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada tanggal, Desember 2020 M

Jumadil Awal 1442 H


BUPATI GAYO LUES,


H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren

Pada tanggal, Desember 2020 M

Jumadil Awal 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,


I. RASYIDIN PORANG

NIP. 19671220 199403 1 003

TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
 KABUPATEN GAYO LUES
 TAHUN ANGGARAN 2021

Luapan

No	Kecamatan	Nama Kampung	Klasifikasi JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Kampung KOR	Desa JPH	Alokasi Aftward	Skor Kinerja	Rasio Kinerja - Rata-rata	Rasio Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Total Alokasi	Alokasi Persentase	Rasio Dana Kampung per-Kampung																																																															
											Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin																																																																											
											(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)				(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	(70)	(71)	(72)	(73)	(74)	(75)	(76)	(77)	(78)	(79)	(80)	(81)	(82)	(83)	(84)	(85)	(86)
1	Bangkaejen	Kora Bangkaejen	3	641.574.000	MANDIRI	5	48	47,7167	4	288.153.000	3.071	0,0903	0,0030	116	0,0145	0,0058	2	0,0004	0,0003	23	0,0040	0,0023	0,0021	315.090.000	1.245.217.000																																																																
2	Bangkaejen	Penampaan	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	8	7,5116	115	1.564	0,0154	0,0015	41	0,0052	0,0021	3	0,0006	0,0001	41	0,0073	0,0022	0,0055	184.108.000	615.677.000																																																																	
3	Bangkaejen	Bukit	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	44	43,5237	32	1.037	0,0102	0,0010	20	0,0025	0,0010	3	0,0005	0,0001	38	0,0068	0,0020	0,0041	129.265.000	770.876.000																																																																	
4	Bangkaejen	Bacang	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	6	5,5784	131	472	0,0047	0,0005	25	0,0031	0,0013	28	0,0054	0,0011	35	0,0063	0,0019	0,0047	145.570.000	507.344.000																																																																	
5	Bangkaejen	Durin	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	37	37,4971	104	1.108	0,0105	0,0011	01	0,0101	0,0041	2	0,0004	0,0001	38	0,0068	0,0023	0,0079	275.556.000	848.170.750																																																																	
6	Bangkaejen	Cumpang Jawa	3	541.574.000	BERKEMBANG	7	7	7,4632	116	2.454	0,0242	0,0024	107	0,0729	0,0044	3	0,0005	0,0001	26	0,0046	0,0014	0,0143	444.758.000	1.084.372.000																																																																	
7	Bangkaejen	Porang	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	42	21,9721	60	1.378	0,0136	0,0014	21	0,0028	0,0011	3	0,0005	0,0001	34	0,0030	0,0018	0,0043	334.226.000	775.794.000																																																																	
8	Bangkaejen	Kute Urang	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	37	37,1806	105	4.212	0,0416	0,0042	44	0,0055	0,0032	6	0,0011	0,0002	22	0,0038	0,0012	0,0077	240.935.000	882.529.000																																																																	
9	Bangkaejen	Leme	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	47	47,0064	8	288.153.000	970	0,0096	0,0010	28	0,0035	0,0014	12	0,0023	0,0005	28	0,0050	0,0015	0,0043	134.847.000	684.574.000																																																																
10	Bangkaejen	Gale	3	541.574.000	BERKEMBANG	3	48	47,5413	5	288.153.000	2.046	0,0202	0,0020	11	0,0014	0,0006	1	0,0001	0,0001	28	0,0049	0,0015	0,0032	129.889.000	1.059.116.000																																																																
11	Bangkaejen	Sere	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	45	45,1630	16	868	0,0096	0,0010	35	0,0044	0,0018	13	0,0025	0,0005	42	0,0075	0,0022	0,0054	146.731.000	731.305.000																																																																	
12	Bangkaejen	Cempa	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	41	41,0870	40	472	0,0047	0,0005	31	0,0014	0,0006	2	0,0001	0,0001	36	0,0064	0,0019	0,0030	92.830.000	454.404.000																																																																	
13	Bangkaejen	Lemuh	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	43	43,0642	82	795	0,0078	0,0008	15	0,0019	0,0008	7	0,0013	0,0003	37	0,0057	0,0017	0,0035	109.787.000	670.861.000																																																																	
14	Bangkaejen	Polok	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	44	43,8303	29	1.147	0,0113	0,0011	31	0,0039	0,0016	61	0,0016	0,0023	53	0,0058	0,0018	0,0068	238.847.000	852.421.000																																																																	
15	Bangkaejen	Penggalangan	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	7	6,5518	127	1.894	0,0187	0,0019	21	0,0026	0,0011	31	0,0059	0,0012	33	0,0058	0,0017	0,0058	181.648.000	829.262.000																																																																	
16	Bangkaejen	Agusan	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	47	46,8453	9	288.153.000	850	0,0084	0,0008	66	0,0083	0,0033	202	0,0083	0,0077	40	0,0071	0,0021	0,0139	434.361.000	1.384.088.000																																																																
17	Bangkaejen	Bustanussalam	3	641.574.000	MAJU	3	46	45,8988	13	288.153.000	3.388	0,0334	0,0033	40	0,0050	0,0020	6	0,0001	0,0001	33	0,0059	0,0018	0,0047	158.533.000	768.107.000																																																																
18	Bangkaejen	Pencampian Uken	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	39	38,8531	98	1.925	0,0190	0,0019	6	0,0008	0,0001	3	0,0005	0,0001	33	0,0059	0,0018	0,0047	158.533.000	768.107.000																																																																	
19	Bangkaejen	Ratunung	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	39	38,7495	100	1.096	0,0108	0,0011	25	0,0031	0,0013	4	0,0008	0,0002	24	0,0043	0,0013	0,0038	117.213.000	758.763.000																																																																	
20	Bangkaejen	Sepang	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	43	43,1815	40	333	0,0033	0,0003	11	0,0015	0,0006	6	0,0011	0,0001	45	0,0080	0,0024	0,0036	112.026.000	672.600.000																																																																	
21	Kutapanjang	Tampang	3	541.574.000	BERKEMBANG	1	40	39,5914	94	1.088	0,0107	0,0011	16	0,0020	0,0004	10	0,0018	0,0004	31	0,0056	0,0017	0,0059	121.892.000	763.464.000																																																																	
22	Kutapanjang	Bener	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	44	43,5649	33	832	0,0082	0,0008	26	0,0033	0,0013	146	0,0026	0,0006	38	0,0057	0,0020	0,0097	301.130.000	862.704.000																																																																	
23	Kutapanjang	Ulu Tanah	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	47	47,0374	7	288.153.000	586	0,0059	0,0006	32	0,0040	0,0016	9	0,0017	0,0003	25	0,0045	0,0013	0,0029	120.445.000	970.172.000																																																																
24	Kutapanjang	Kuta Utang	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	7	7,1236	121	912	0,0090	0,0009	46	0,0058	0,0023	4	0,0007	0,0001	44	0,0079	0,0024	0,0057	177.795.000	739.372.000																																																																	
25	Kutapanjang	Beranzang	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	46	45,8764	35	694	0,0069	0,0007	5	0,0006	0,0003	148	0,0080	0,0056	31	0,0055	0,0017	0,0082	258.752.000	817.336.000																																																																	
26	Kutapanjang	Rikit Dabat	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	8	8,0959	113	881	0,0087	0,0009	14	0,0018	0,0007	15	0,0028	0,0006	23	0,0040	0,0012	0,0034	105.072.000	746.646.000																																																																	
27	Kutapanjang	Rembe	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	46	46,1148	130	1.197	0,0118	0,0012	15	0,0019	0,0008	6	0,0011	0,0002	23	0,0040	0,0012	0,0034	105.072.000	746.646.000																																																																	
28	Kutapanjang	Rama Baru	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	7	7,3703	117	730	0,0072	0,0007	41	0,0051	0,0021	33	0,0062	0,0022	20	0,0036	0,0011	0,0051	158.478.000	730.052.000																																																																	
29	Kutapanjang	Oh	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	43	42,8665	46	341	0,0034	0,0003	5	0,0006	0,0001	2	0,0001	0,0001	43	0,0076	0,0023	0,0079	91.033.000	652.807.000																																																																	
30	Kutapanjang	Rerutunan Kuta Pantang	3	641.574.000	MAJU	3	5	5,2501	132	1.432	0,0141	0,0014	9	0,0011	0,0005	2	0,0004	0,0001	16	0,0029	0,0008	0,0028	87.785.000	729.358.000																																																																	
31	Kutapanjang	Tampang Musara	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	43	42,8647	47	670	0,0066	0,0007	13	0,0022	0,0009	6	0,0012	0,0002	28	0,0050	0,0015	0,0033	102.897.000	664.471.000																																																																	
32	Kutapanjang	Kong Pakuh	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	41	41,4839	71	291	0,0029	0,0003	34	0,0043	0,0017	4	0,0007	0,0001	43	0,0076	0,0023	0,0044	117.096.000	698.670.000																																																																	
33	Rikit Galib	Ampa Kolak	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	43	43,4309	35	389	0,0038	0,0004	134	0,0146	0,0047	13	0,0026	0,0005	48	0,0085	0,0026	0,0042	137.903.000	878.474.000																																																																	
34	Rikit Galib	Cane Toa	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	44	43,9151	34	411	0,0041	0,0004	185	0,0232	0,0093	6	0,0012	0,0002	59	0,0105	0,0031	0,0030	406.420.000	967.984.000																																																																	
35	Rikit Galib	Padang Pasir	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	2	43	42,9376	48	352	0,0035	0,0003	32	0,0040	0,0016	0	0,0001	0,0000	54	0,0095	0,0029	0,0048	156.508.000	712.082.000																																																																	
36	Rikit Galib	Pirang Rugub	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	43	43,2848	38	393	0,0039	0,0004	6	0,0008	0,0003	88	0,0188	0,0034	52	0,0092	0,0028	0,0048	132.065.000	773.879.000																																																																	
37	Rikit Galib	Buning	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	3	47	46,5718	11	288.153.000	323	0,0032	0,0003	33	0,0004	0,0004	10	0,0019	0,0004	60	0,0107	0,0032	0,0045	138.921.000	888.646.000																																																																
38	Rikit Galib	Mengang	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	2	41	41,1229	78	282	0,0028	0,0003	7	0,0009	0,0004	0	0,0001	0,0000	56	0,0101	0,0030	0,0037	113.964.000	793.538.000																																																																	
39	Rikit Galib	Bempelan	2	561.574.000	TERTINGGAL	1	45	44,6478	23	250	0,0025	0,0002	7	0,0009	0,0004	25	0,0044	0,0010	47	0,00																																																																					

